

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELUANG PARTAI LOKAL
PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PIDIE JAYA**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

REZA FAHLEVI
NIM. 160801090

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Fahlevi
NIM : 160801090
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2023

Yang menyatakan


42429AKX344314184 **Reza Fahlevi**
NIM. 160801090

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELUANG PARTAI LOKAL
PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

REZA FAHLEVI
NIM. 160801090

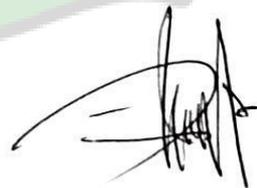
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I **AR-RANIRY** Pembimbing II



Eka Januar, M.Soc. Sc.
NIP. 19840101 201503 1 003



Arif Akbar, M.A
NIP. 19911024 202203 1 001

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELUANG PARTAI LOKAL
PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 28 April 2023
07 Syawal 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 19840101 201503 1 003

Sekretaris



Arif Akbar, M.A

NIP. 19911024 202203 1 001

Penguji I



Aklima, S.Fil.I., M.A

NIP. 19881006 201903 2 009

Penguji II



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A

NIP. 19860513 201903 1 006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 19740327 199903 1 005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau serta orang-orang mukmin yang tetap istiqomah di jalan-Nya. Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penyusun apat menyelesaikan tugas akhir/ skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Peluang Partai Lokal Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya”**. Skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya, dan semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik kalian semua. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta dan adik semata wayang yang tanpa henti mendukung dan memberikan doa kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik

4. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
5. Bapak Eka Januar, M. Soc. Sc. Sebagai pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Arif Akbar, M.A. Sebagai pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
8. Seluruh Dosen yang berada di ruang lingkup Prodi Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan menambah wawasan bagi penulis, serta staff administrasi yang berada di ruang lingkup prodi Ilmu Politik yang banyak membantu kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2016 Prodi Ilmu Politik yang telah mendukung dan memberi dorongan serta memberikan masukan/kritikan kepada penulis.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan.

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kemampuan penulis di waktu akan datang. Penyusun berharap

karya ilmiah tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 17 April 2023
Penulis.

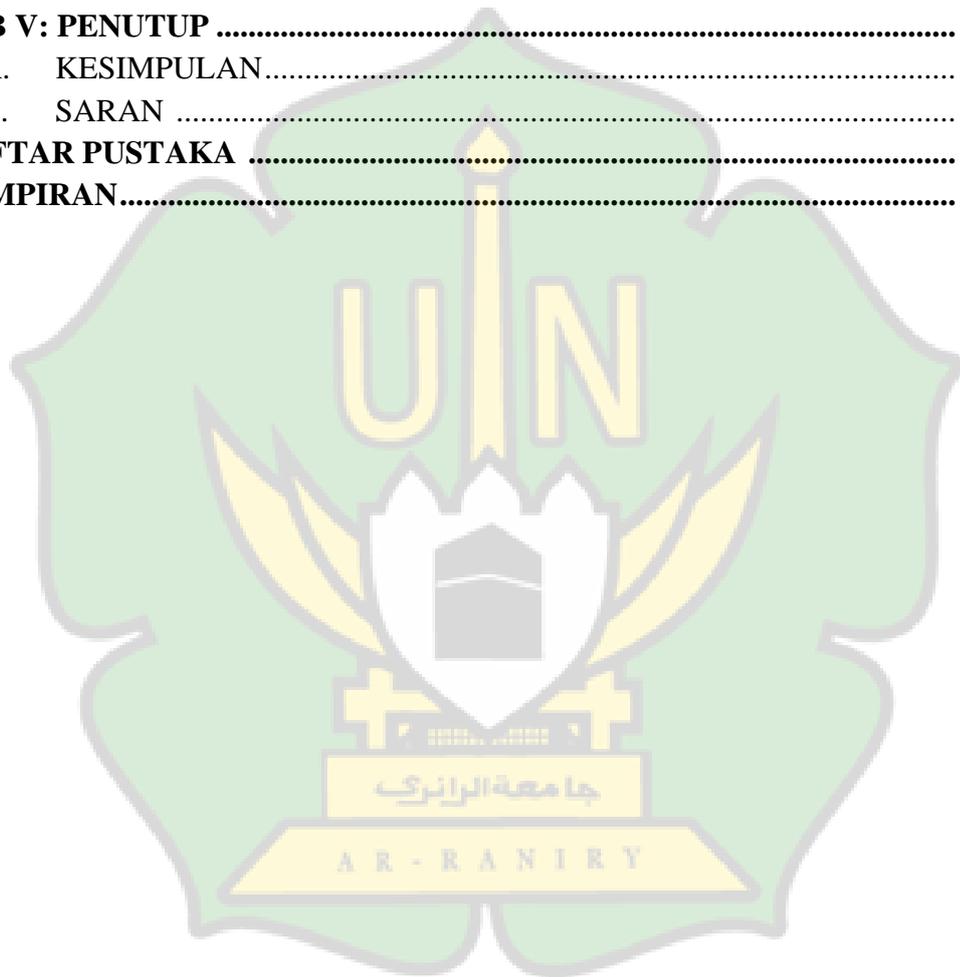
Reza Fahlevi
NIM. 160801090



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Terdahulu	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Persepsi Masyarakat	10
2.2. Konsep Partisipasi	13
2.3. Partai Politik Lokal	14
2.3.1. Sejarah Lahirnya Partai Lokal Di Aceh	14
2.3.2. Peran Partai Lokal Di Aceh Dalam Upaya Penguatan Demokrasi Di Aceh	16
2.4. Teori Partisipasi Politik Dan Pembangunan Politik	17
2.4.1. Partisipasi Politik	17
2.4.2. Pembangunan Politik	18
2.5. Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia	20
BAB III: METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2. Jenis dan Sumber Data	28
3.3. Fokus Penelitian	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Analisis Data	32
3.6. Uji Keabsahan Data	33
3.7. Panduan Penulisan	34

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. sejarah Pidie Jaya.....	35
4.2. Pemilihan Umum (Pemilu)	36
4.3. Partai Politik Lokal	37
4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.4.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Peluang Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya	44
4.4.2. Strategi Partai Lokal Aceh Dalam Memperoleh Suara Terbanyak Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya	49
BAB V: PENUTUP	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gambaran Perolehan Kursi DPRK Pidie Jaya Sejak pemilu 2009-2019	3
Tabel 3.1	Data-data Responden	29
Tabel 4.1	Data Jumlah Kursi dalam Periode 2014-2024	43
Tabel 4.2	Alokasi Kursi dan Wilayah Dapil	46
Tabel 4.3	Perbedaan Strategi Kampanye	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gibson.....	12
Gambar 4.1	Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gestalt.....	45
Gambar 4.2	Peningkatan Jumlah Pengguna Aktif Media sosial di Indonesia dari tahun 2014-2022	53



DAFTAR LAMPIRAN

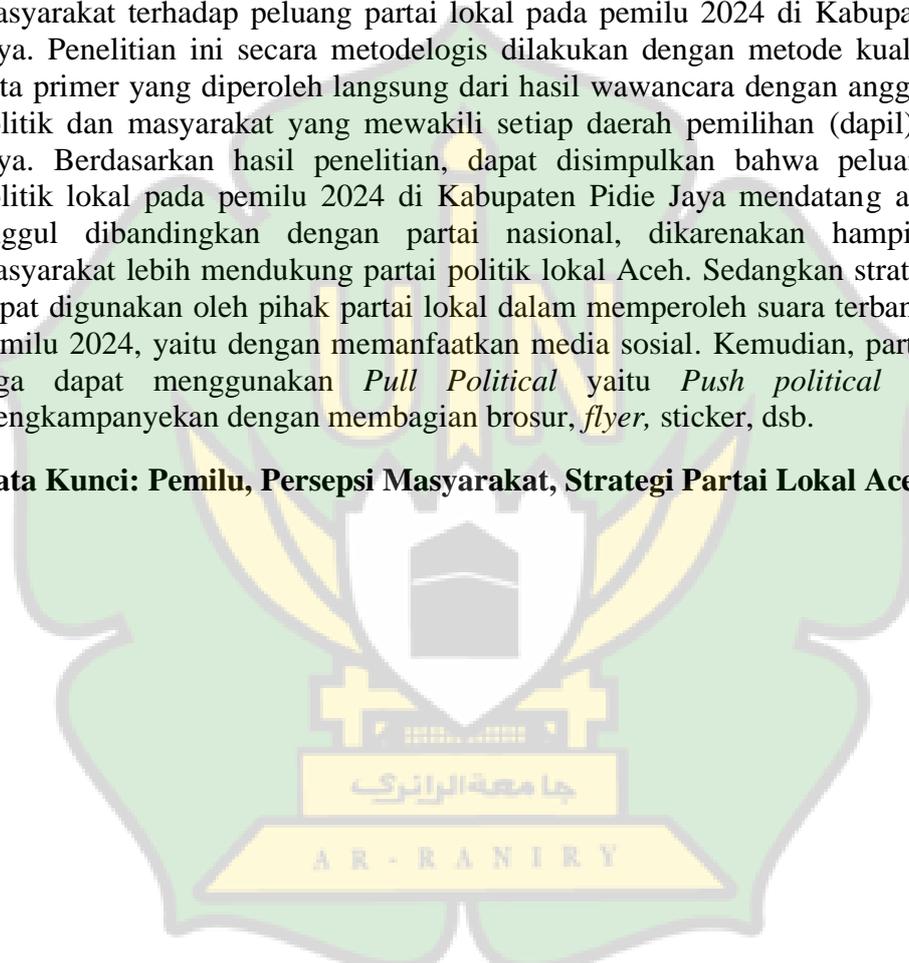
Lampiran I	Hasil Wawancara per Dapil.....	66
Lampiran II	Hasil Dokumentasi.....	75
Lampiran III	Lembar Wawancara.....	84
Lampiran IV	Daftar Riwayat Hidup	86



ABSTRAK

Salah satu ciri negara demokrasi yaitu dengan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah sebuah proses pemilihan yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang menggunakan hak pilih masing-masing sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Lahirnya partai politik lokal Aceh adalah hasil rekomendasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pendirian partai politik lokal juga berdasarkan dalam peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap peluang partai lokal pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini secara metodologis dilakukan dengan metode kualitatif dan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan anggota partai politik dan masyarakat yang mewakili setiap daerah pemilihan (dapil) di Pidie Jaya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peluang partai politik lokal pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya mendatang akan lebih unggul dibandingkan dengan partai nasional, dikarenakan hampir semua masyarakat lebih mendukung partai politik lokal Aceh. Sedangkan strategi yang dapat digunakan oleh pihak partai lokal dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian, partai politik juga dapat menggunakan *Pull Political* yaitu *Push political* dengan mengkampanyekan dengan membagikan brosur, *flyer*, sticker, dsb.

Kata Kunci: Pemilu, Persepsi Masyarakat, Strategi Partai Lokal Aceh



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kontestansi Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh selalu menjadi bahan yang menarik untuk di diskusikan oleh berbagai kalangan, di mana keberadaan partai politik lokal (parlok) menyebabkan kontestasi pemilu di Aceh lebih menarik dan menggambarkan kedaerahan Aceh. Terjadinya proses transformasi politik di tanah Aceh melahirkan konsepsi besar (*Grand Concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik yang tidak disertai perwakilan secara Nasional sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008. Maka dari situlah, partai politik lokal yang didirikan di Aceh yang memenuhi kriteria untuk maju dalam pemilihan legislatif pertama tahun 2009 hasil verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.¹

Legalitas partai politik lokal di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini merupakan hasil dari negosiasi panjang setelah konflik berkepanjangan di Aceh. Karena norma-norma tentang partai politik lokal yang diatur dalam UUPA masih sangat umum, maka diperlukan aturan pelaksana yang menjabarkan dan menafsirkan norma-norma tersebut secara implementatif.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20/2007 (PP Parlok) tentang partai politik

¹ Hamdan Basyar, Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 265.

lokal di Aceh. Kehadiran partai politik lokal di Aceh sangat masif dalam tiga kali pemilu yang telah berlangsung selama ini, yaitu pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka menjadi poin penting bagi proses transisi politik. Kehadiran partai-partai lokal di Aceh menjadi pertanda upaya terbuka mereka untuk berkompetisi memperebutkan kekuasaan politik sesuai peraturan perundang-undangan, memperebutkan sekitar 5 juta suara yang menjadi hak mereka. Hal ini dibuktikan dengan reaksi masyarakat Aceh yang sangat positif terhadap keberadaan partai lokal: data yang diperoleh dari survei LSI dari tahun 2005 hingga Maret 2006 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai lokal.²

Tahapan pemilu 2024 telah dimulai termasuk pendaftaran partai politik di Aceh. Terdapat enam partai lokal di Aceh dinyatakan terdaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Berikut enam partai lokal yang telah terdaftar dan memenuhi syarat serta kelengkapan dokumen lainnya yaitu: Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaath dan Taqwa (GABTHAT), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira).³ Hal ini menunjukkan adanya penambahan partai lokal sebagai peserta pemilu dari yang sebelumnya pemilu 2019-2024 hanya 4 partai lokal saja.

Partai lokal tersebut telah dinyatakan lulus untuk mengikuti pesta demokrasi di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa partai lokal di Aceh masih eksis dan

²Muhammad Djafar, *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).hlm. 115-117.

³ <https://Kip.acehprov.go.id> diakses kembali pada Tanggal 07-September-2022.

dapat diperhitungkan keberadaannya. Pasca terlaksananya pesta demokrasi tahun 2019 di Aceh kepercayaan masyarakat Aceh terhadap partai lokal masih tetap tinggi khususnya di daerah Pidie Jaya. Dimana pada pemilihan legislatif periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Pidie Jaya, dari 25 anggota DPRK partai lokal dapat mendominasi oleh Partai Aceh (PA), dan juga Partai PNA. Bahkan setiap daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Pidie Jaya ada perwakilan dari Partai Aceh (PA).

Perolehan suara pileg 2019-2024 kabupaten Pidie Jaya dari dapil I meliputi Kecamatan Meureudu, Ulim dan Kecamatan Meurah Dua yaitu; A. Kadir Jailani (Partai Aceh), Saifullah (Partai Aceh), dan Muhammad, SE (Partai PNA), kemudian dapil II (Kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya) yaitu: Edi Sahputra (Partai Aceh), dan Hasnita (Partai Aceh), Dapil III (Kecamatan Bandar Baru,yaitu;Saiful Anwar (Partai Aceh), Misdar (Partai Aceh), Dapil IV (Kecamatan Trienggadeng dan Panteraja), yaitu Abdul Muthalib (Partai Aceh), Fadlillah (Partai Aceh), dan Nazaruddin Ismail (PNA).⁴

Partai Lokal	Pemilu 2014-2019	Pemilu 2019-2024
Partai Aceh	9 Kursi	8 Kursi
Partai PDA	1 Kursi	-
Partai PNA	1 Kursi	2 Kursi
Partai SIRA	-	-

Tabel 1.1 Gambaran Perolehan kursi DPRK Pidie Jaya sejak pemilu 2009-2019.

⁴<https://www.ajnn.net/news/24-dari-25-anggota-dprk-pidie-jaya-periode-2019-2024dilantik/index.html>.diakses kembali padaTanggal 07-September-2022.

Disamping pemilihan di tingkat daerah atau kabupaten, pada tingkat Provinsi, partai lokal juga masih tetap eksis dan menang. Bahkan dapat mendominasi kemenangan secara keseluruhan di Aceh. Khusus di dapil 2 Aceh (Pemilihan Pidie dan Pidie Jaya) partai lokal memperoleh suara terbanyak dan lolos sebagai anggota DPRA dalam pemilihan legislatif 2019 di dominasi oleh partai lokal Aceh yaitu Partai Aceh dan Partai PNA. Partai Aceh (PA) masih menjadi partai peraih suara terbanyak dengan meraup 29.335 suara. Sumbangan terbesar suara PA berasal dari caleg atas nama Saiful Bahri H Dahlan Jamaluddin, kemudian pada partai PNA M. Riza Fahlevi Kirani, dan Wahyu Wahab Usman dari partai PDA.⁵

Dengan demikian, dari hasil perolehan suara dan kursi legislatif maupun eksekutif, menunjukkan bahwa partai lokal Aceh mampu bersaing bahkan memenangkan pemilu di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dari masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Pidie Jaya beranggapan bahwa masih membutuhkan partai lokal Aceh sebagai wadah atau penyambung dari perjuangan aspirasi masyarakat Aceh secara umum dan khususnya masyarakat Pidie Jaya. Kemudian persepsi masyarakat menunjukkan rata-rata atau mayoritas masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih kuat kepercayaan dan dukungannya terhadap partai politik lokal. Sehingga peluang partai politik lokal untuk meraih kemenangan sangat terbuka pada pemilu yang akan datang.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu menganalisa terhadap berbagai macam pandangan dari masyarakat terhadap peluang kedepannya partai lokal di Aceh untuk merebut hati rakyat Aceh pada pemilu

⁵<https://Kip.acehprov.go.id> kembali pada Tanggal 07-September-2022.

2024 yang akan datang. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Peluang Partai Lokal Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Peluang Partai Lokal Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana strategi Partai Lokal Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Adapun tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap peluang partai lokal Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya.
- Untuk mengetahui bagaimana strategi partai lokal Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pidie Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis
 - Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memperkaya bahan dan khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik, ilmu sosial dan pemerintahan.
 - Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi akademik dalam perkembangan konsep dan teori ilmu politik dan pemerintahan.
- Manfaat Praktis
 - Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai persepsi masyarakat terhadap peluang Partai Lokal dalam pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya.
 - Setelah penelitian ini dilakukan penulis berharap nantinya menjadi referensi ilmiah yang berkaitan dengan ilmu politik. Serta dapat memberikan informasi bagi akademisi, peneliti di bidang politik, masyarakat, pemerintahan dan lainnya.

1.5. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis banyak menemukan kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis, diantaranya:

Feisal Akbar dan Mujibussalim, dalam penelitiannya dengan judul “*Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA dan strategi masa depan PDA sebagai partai lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA, dalam hal ini PDA, mengharuskan PDA melakukan terobosan-terobosan baru dengan melakukan pencitraan partai (party branding) untuk mendapatkan kredibilitas sehingga dapat menciptakan kredibilitas. Strategi PDA terkait eksistensinya sebagai partai lokal adalah dengan membangun komitmen untuk mengawasi proses pemilu, karena PDA mengalami banyak penyimpangan di lapangan dan PDA kehilangan banyak suara. pesantren dan mengajak generasi muda untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁶

Kemudian Muhammad Siddiq Armia menulis dalam buku karyanya dengan judul “Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal Pengisian Jabatan Publik” menjelaskan tentang hubungan antara partai

⁶ Feisal Akbar dan Mujibussalim, Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009, Jurnal Ilmiah FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 230-247 Juli 2017.

lokal dan partai politik nasional. Penulis mengadopsi metode perbandingan politik, mengambil Jerman sebagai salah satu pilihannya. Kajian ini lebih melihat bagaimana partai lokal dan partai nasional menyepakati jabatan publik tersebut. Artikel ini akan membahas secara singkat permasalahan pengisian jabatan publik tersebut. Di Indonesia, pemilihan dan pengangkatan pejabat publik tidak selalu diatur, terutama di tingkat Provinsi.⁷

Kemudian dalam penelitian Fattaqun berjudul “Peran Partai Aceh dalam Menciptakan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam”. Diantaranya, kajian ini lebih fokus untuk memahami sejarah lahirnya partai politik lokal di Aceh dan peran partai politik di Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh.

Temuannya menjelaskan bahwa Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka untuk perdamaian di Provinsi Aceh. Dirancang untuk meninggalkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan GAM. Keberhasilan pencapaian—ini patut diacungi jempol, mengingat penderitaan rakyat Aceh selama puluhan tahun akibat kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, langkah-langkah kompromi untuk mempertahankan dan menjaga kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilihat sebagai sebuah keberhasilan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Partai-partai politik lokal menyadari bahwa perdamaian telah membawa perdamaian di Aceh, terutama partai mayoritas Partai Demokrasi Revolusioner Aceh (DPRA). Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan variabel dengan penelitian yang penulis kaji. Dimana penulis lebih memfokuskan

⁷ Muhammad Siddiq Armia, Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik, *Jurnal Review Politik*, Volume 07, Nomor 01, UIN Ar-Raniry, Juni 2017.

pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap peluang partai lokal di Aceh di pemilu 2024 serta strategi partai lokal di Aceh agar dapat memperoleh suara dan dapat memenangi pemilu 2024.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁸ Umumnya, istilah persepsi digunakan dalam bidang Psikologi. Secara terminologi, konsep persepsi adalah tanggapan langsung terhadap penyerapan atau proses dimana seseorang belajar tentang beberapa hal melalui persepsi. Sementara itu, dalam "*Dictionary of Psychology*", persepsi diartikan sebagai proses dimana orang mengamati lingkungan sekitar melalui panca indera dan menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya.⁹

Secara epistemologis, Persepsi berasal dari kata Latin yaitu "*perception*" dari "*percipere*", artinya menerima. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Secara luas, itu adalah sudut pandang atau pemahaman, bagaimana seseorang melihat dan memaknai sesuatu. Menurut De Vito yang dikutip Wiwin Widyaning ayu, persepsi adalah ketika kita menyadari banyak rangsangan yang mempengaruhi indera kita.¹⁰

Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses mengidentifikasi,

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304.

⁹ Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hlm.21.

¹⁰ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2011), hlm. 116.

mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan dan memahami informasi yang ditangkap oleh panca indera. Persepsi adalah proses dalam sistem saraf yang dihasilkan dari rangsangan fisik dan panca indera. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk menggambarkan pengalaman tentang suatu objek atau peristiwa. Persepsi memberikan makna pada rangsangan indera. Persepsi merupakan aspek penting dalam tanggapan manusia terhadap berbagai aspek dan manifestasi lingkungan sekitarnya. Persepsi terbentuk melalui proses memahami informasi stimulus dan memberikan makna. Stimulus itu sendiri diperoleh dan diolah oleh otak melalui proses pemahaman terhadap hubungannya dengan objek, peristiwa, dan gejala. Ada beberapa teori yang membahas tentang persepsi manusia terhadap lingkungan:

- a) Menurut Clifford T. Morgan, "Persepsi adalah proses mengidentifikasi rangsangan dan menafsirkan maknanya". (Persepsi adalah proses membedakan antara banyak rangsangan dan menafsirkan makna rangsangan tersebut).¹¹
- b) Menurut Profesor Bimo Wargit, persepsi adalah proses yang mendahului terjadinya sensasi, yaitu merupakan proses dimana individu menerima rangsangan melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Namun, proses tersebut tidak berhenti begitu saja, rangsangan terus berlanjut dan proses selanjutnya adalah proses persepsi.¹²
- c) *Ecological perception of the environment*

Teori persepsi ekologis yang dikemukakan oleh Gibson menekankan

¹¹ Clifford T Morgan, Op.cit.. hlm.229.

¹² Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 88

perlunya pendekatan persepsi dan terarah untuk menyediakan informasi sebanyak mungkin tentang suatu lingkungan kepada penerima, termasuk pemahaman lingkungan, objek karakter atau tempat melalui sedikit usaha dalam aktivitas kognitif. seseorang dapat menyimpulkan bahwa persepsi orang adalah pendapat orang yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman suatu objek atau dari suatu peristiwa yang telah dialami atau yang akan terjadi.¹³ Selanjutnya bila diurutkan dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gibson
Sumber : Bell, 2001

Kata "*society*" dalam bahasa Inggris diubah dari kata "*socius*" yang artinya masyarakat. Kata "sosial" berasal dari kata Arab "*syrik*", yang berarti sosial atau interaksi dalam bahasa ilmiah. Adanya keterkaitan itu tentu saja karena adanya bentuk-bentuk kehidupan yang teratur yang tidak disebabkan oleh manusia sebagai individu melainkan oleh faktor kekuatan lain. Dalam arti yang lebih spesifik, masyarakat juga dikenal sebagai solidaritas sosial atau ikatan kasih sayang yang erat. Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Hal itu kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia yang artinya berkaitan dan pembentukan kelompok atau golongan.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat merupakan pandangan dari masyarakat yang digunakan untuk mengungkapkan

¹³ Gibson, M., 2001, *Pharmaceutical Preformulation and Formulation*, 546-550. CRC Press, United States of America

¹⁴Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.

tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun kejadian yang pernah dialami atau yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sedangkan masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang hidup pada suatu tempat dan bergaul satu sama lain sehingga menimbulkan suatu aturan yang bersifat tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

2.2. Konsep Partisipasi

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata "*participate*", *participation* yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta. Adapun keterlibatan menjadikan keterkaitan atau jasa tempuh seseorang secara pribadi maupun perkumpulan bagian dalam suatu urusan tertentu. Menurut Santoso Sastropoetro dikutip berasal Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan: "Partisipasi bisa didefinisikan seperti keterkaitan mental/ kelicikan dan emosi/ pikiran seseorang di bagian dalam keadaan perkumpulan yang mendorongnya kepada menyerahkan sedekah untuk perkumpulan bagian dalam servis merengkuh objek tempuh ikut serta bertanggungjawab terhadap servis yang bersangkutan."¹⁵

Partisipasi masyarakat menuju untuk adanya keterlibatan sipil secara nyata dalam suatu urusan. Partisipasi ini berupa gagasan, catatan yang membangun, lindungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam tata pihak berkuasa yang kebijakannya bersemangat *top-down*, keterlibatan sipil bagian dalam jasa-jasa yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun depan tata pihak berkuasa yang *bottom-up*, tingginya keterlibatan sipil bisa dijadikan

¹⁵ R.A.Santoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasidan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 13.

ukuran keberhasilan jasa tersebut.¹⁶

Loekman Soetrisno menjelaskan bahwa ada dua definisi partisipasi dalam masyarakat. Pertama, definisi dari lembaga-lembaga perencanaan pembangunan formal di Indonesia, di mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesediaan masyarakat untuk mendukung program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, definisi dari lembaga-lembaga perencanaan pembangunan formal di Indonesia, dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan didefinisikan sebagai kesediaan masyarakat untuk mendukung program-program yang ditentukan oleh pemerintah. berlaku di universal, partisipasi rakyat dalam pembangunan yaitu lerrja sama antara perencana dan rakyat dalam meereencanakan. Melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.¹⁷

2.3. Partai Politik Lokal

2.3.1. Sejarah Lahirnya Partai Lokal di Aceh

Sejarah berdirinya partai politik lokal di Aceh didasarkan pada rekomendasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang dikenal dengan Nota Kesepahaman Helsinki (MOU), antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Hal ini diperkuat dengan legalitas yang ditekankan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan dalam Bab XI, Partai Lokal, pada Pasal 75(1) bahwa 'penduduk Aceh dapat

¹⁶ E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah PROFISIONAL, dalam konteks menyuksekkan MBS dan KBK, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004, hlm.170.

¹⁷ Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

membentuk partai lokal'. Selain itu, Pasal (4) menjelaskan bahwa partai lokal beroperasi dari Ibukota Aceh.¹⁸

Disamping aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pendirian atau pembentukan partai politik lokal juga diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Lahirnya partai politik lokal buah dari hasil kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dengan GAM Aceh. Pada tahun 2005 beberapa tokoh GAM diluar negeri kalangan GAM di Eropa pulang ke Aceh, mengatakan pulang kampung ini merupakan indikasi mengimplementasikan memorandum Helsinki yang akan memperlancar pelaksanaan hasil memorandum.

Partai politik lokal memberikan perlakuan khusus kepada mantan GAM atas kesempatan memperoleh identitas politik di Aceh. Pembahasan tentang parpol lokal jangan hanya didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi keinginan GAM. Namun, keberadaan partai politik lokal menjadi ekspresi makna demokrasi di Aceh.¹⁹

Partai politik lokal ini didirikan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat setempat (lokal), khususnya Aceh sebagai partisipasi politik di tingkat daerah di Aceh. Keberadaan partai ini merupakan hasil perjuangan rakyat Aceh melalui mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Aceh (PA) merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lahir dalam rahim Nota Kesepahaman Helsinki antara GAM dengan pemerintah Indonesia.

¹⁸Lembaran Negara Republik Indonesia No.4633,Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,dalam Pasal 75.

¹⁹ Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh.(Jakarta: Penerbit Suara Bebas,2006), hlm. 313.

Sementara itu, peneliti memahami Partai Aceh (PA) sebagai “salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh”.²⁰

2.3.2. Peran Partai Lokal di Aceh dalam Upaya Penguatan Demokrasi di Aceh

Pemilu dianggap sebagai alat penting dalam proses demokrasi Republik Indonesia. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di Aceh, barometer ini selalu menjadi dilema. Maka jika dikaitkan dengan demokrasi lokal, masyarakat di daerah juga memiliki hak sipil dan politik, salah satunya dengan menunjukkan bahwa partai politik lokal Aceh sangat meyakini adanya pemeluknya sebagai bentuk demokrasi lokal. Aceh didorong untuk terbuka terhadap dinamika dan perubahan kehidupan sosial.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merinci legalitas keberadaan partai politik lokal di Indonesia. Undang-undang (UU) lahir dari proses negosiasi yang berlarut-larut setelah konflik panjang di Aceh. Mengingat norma mengenai partai politik lokal (Parlok) dalam UUPA masih sangat umum, maka diperlukan peraturan pelaksana untuk menjabarkan dan menjelaskan norma tersebut secara ekuatif. Sejalan dengan itu, pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh.²²

Peran partai politik lokal di Aceh dalam upaya menguatkan sistem pemilu di Indonesia memiliki peran besar untuk mewujudkan demokrasi di Aceh. Salah satu

²⁰ Muzakir Manaf, “PA Milik Masyarakat Dalam Naungan NKRI” dalam Serambi Indonesia, (Koran Serambi pada Tanggal 25 Juni 2013), hlm. 7.

²¹ Asda Rasida, dkk., Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Varia Justicia: Vol 12 No.2, 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.10.

²² Ahmad Farhan Hamid, Partai politik lokal di Aceh: Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan. Jakarta: Publisher Kemitraan, 2008), hlm.13.

caranya yaitu melalui partai politik sebagai alat demokrasi. Kedudukan partai lokal di Aceh dalam penguatan sistem pemilu di Indonesia menjelaskan bahwa Aceh secara konstitusi punya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memiliki “*asas lex specialis derogat legi generalis*” yang secara kedudukan hukum berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Salah satunya yaitu adanya partai politik lokal, partai politik lokal Aceh harus menjadi *role model* untuk pesta demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh dapat dikatakan mampu mewarnai pesta demokrasi di Aceh, sehingga demokrasi di Aceh dapat dikatakan sukses karena adanya partai lokal yang ikut aktif terlibat dalam membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera dari segala sisi.

2.4. Teori Partisipasi Politik dan Pembangunan Politik

Untuk mendukung studi ini digunakan beberapa teori yang relevan serta berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik oleh para akademisi di negara-negara Barat sering kali dilihat sebagai sekadar memberi saran kepada para pembuat kebijakan tentang aturan main. Dengan definisi seperti itu, sulit untuk mengklasifikasikan partisipasi politik di negara berkembang sebagai bentuk partisipasi politik. Untuk mengatasi hal tersebut, apa yang ingin diatasi oleh Huntington adalah apa yang diklasifikasikan sebagai partisipasi pasif di mata para sarjana di negara berkembang sebenarnya merupakan bentuk partisipasi politik. Di negara

berkembang, selain kegagalan institusi politik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan pandangannya tanpa takut akan intimidasi pemerintah, kecenderungan untuk memobilisasi massa juga menjadi ciri yang melekat.²³

Sikap apatis juga menjadi isu dalam penelitian partisipasi politik. Secara harfiah, ketidakpedulian adalah tidak melakukan apa pun untuk memengaruhi kebijakan atau memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan bukan merupakan bentuk keterlibatan. Namun, jika dilakukan secara sadar sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, sikap apatis juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk keterlibatan dan dapat dinilai sebagai tindakan keterlibatan.

2.4.2. Pembangunan Politik

Pembangunan politik sebagai sebuah konsep atau istilah mendahului istilah-istilah seperti perubahan politik, pembangunan politik dan modernisasi politik. Secara sekilas, semua istilah tersebut tampak mewakili perkembangan dalam studi pembangunan politik. Semua istilah tersebut, terlepas dari bentuk atau hierarkinya, memiliki makna yang berbeda.²⁴

David Apter berpendapat bahwa pembangunan harus digambarkan sebagai perluasan dan integrasi peran-peran fungsional sosial. Dalam konteks ini, modernisasi merupakan bagian penting dari pembangunan. Modernisasi menyiratkan tiga kondisi: sistem sosial yang dapat terus berinovasi tanpa jatuh ke dalam partikularisme, diferensiasi struktur sosial yang fleksibel, dan kerangka

²³ Mochtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 54.

²⁴ Yaya Mulyana dan Sarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hlm. 58-59.

kerja sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan bagian penting dari modernisasi dan strategi fungsional dalam proses manufaktur.

Pembangunan politik sebagai sebuah konsep atau istilah mendahului istilah perubahan politik, pembangunan politik dan modernisasi politik. Secara sekilas, semua istilah ini tampaknya mewakili perkembangan dalam studi pembangunan politik. Semua istilah tersebut, terlepas dari bentuk atau tingkatannya, mengandung makna perubahan.²⁵

Menurut Huntington, ada empat aliran pemikiran tentang makna pembangunan politik:

- Pertama, secara geografis, pembangunan politik diartikan sebagai salah satu gejala kehidupan politik di negara-negara berkembang.
- Kedua, dilihat dari segi asalnya, pembangunan politik merupakan dimensi politik dan konsekuensi dari modernisasi dalam segala aspeknya.
- Ketiga, dari segi tujuannya, pembangunan politik merupakan suatu proses politik menuju satu atau beberapa rezim politik, seperti demokrasi, stabilitas, dan partisipasi.
- Keempat, dari segi fungsional, pembangunan politik merupakan fungsi dari modernisasi dan industrialisasi.²⁶

Sejak kemunculan umat manusia jutaan tahun yang lalu, manusia telah dihadapkan pada berbagai macam perubahan aktual di alam semesta tempat mereka hidup. Respons mereka terhadap fenomena alam ini berangsur-angsur

²⁵Yaya Mulyana dan Sarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016). hlm. 58-59.

²⁶ Encup Supriatna, *Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.15.

berubah menjadi sikap mengatasi perbedaan yang muncul di antara manusia, dan respons mereka terhadap interaksi sosial kemudian mengubah cara hidup dan kebiasaan mereka. Evolusi yang berulang-ulang ini berujung pada penemuan model pelebagaan pengaturan masyarakat dalam kerangka negara, beserta ilmu politik yang menyertainya.

Situasi politik pasca reformasi menghadirkan sistem baru bagi masyarakat dan menuntut masyarakat untuk bertindak lebih mandiri di dalamnya. Dalam penerapannya, tidak semudah yang terlihat di depan mata, sehingga perluasan langkah perlu dilakukan secara bertahap. Pembangunan dan penetrasi kesadaran politik masyarakat tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan politik yang kita inginkan. Lucien W. Pye merangkum tiga tema utama pembangunan politik. Yang pertama adalah tumbuhnya kesamaan antar individu.²⁷

2.5. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah tatanan kehidupan nasional yang dipilih oleh negara-negara di dunia yang lebih luas. Demokrasi muncul dari tuntutan masyarakat Barat akan persamaan hak dan status yang sama di hadapan hukum. Hal ini terjadi karena, sebelum deklarasi Amerika Serikat dan Perancis, semua warga negara dibedakan baik di hadapan hukum maupun dalam tatanan sosial.²⁸

Sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi. Fakta bahwa sistem demokrasi di

²⁷ Rudi Hardi, Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Otoritas, Vol.1 No.1 April 2011, hlm.53-55.

²⁸ Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5, No.1 Oktober 2007, (Semarang: Fakultas UNTAG Hukum, 2007), hlm.54.

Indonesia mengalami pergeseran sejak awal kemerdekaan, lahirnya demokrasi terpimpin, lahirnya demokrasi pancasila, hingga munculnya reformasi, menunjukkan betapa dominannya peran pemerintah negara dalam mewarnai sistem demokrasi di negara Indonesia. Demokrasi dalam arti formal adalah demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik di mana kedaulatan rakyat dijalankan bukan oleh rakyat itu sendiri, melainkan oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui lembaga perwakilan. Sedangkan demokrasi dalam arti material adalah demokrasi sebagai suatu prinsip yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarah suatu negara dan dikenal dengan istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pansila.²⁹

Pasal 1.2 UUD 1945 menyatakan bahwa 'kedaulatan berada di tangan rakyat', dan pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konsep demokrasi. Dengan demikian, salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat adalah melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Lebih lanjut, Amandemen UUD 1945 mencantumkan pemilu dalam Bab VIIB. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya untuk mengisi keanggotaan lembaga-lembaga negara DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, yang disebutkan dalam beberapa pasal dalam UUD 1945.

Pemilu merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi, dan penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat, ide dan pikirannya dalam rangka memilih wakil-wakilnya yang mereka anggap mampu memimpin negara

²⁹ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 199.

dan mengayomi kepentingannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu dari yang berikut ini. "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Demokrasi sebagai suatu system politik adalah suatu sistem dimana kebijakan public ditentukan atas dasar kekuasaan mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan umum secara berkala berdasarkan prinsip persamaan politik dandalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi sebagai sebuah sistem telah digunakan di beberapa negara sebagai alternatif dalam berbagai kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konsep masyarakat madani, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan prasyarat bagi tercapainya kebebasan hak-hak politik rakyat. Sebaliknya, Haedar Nashir berpendapat bahwa demokrasi dalam posisinya sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif atas berbagai kekurangan sistem politik yang ada dalam berbagai model pemerintahan negara, seperti aristokrasi, timokrasi, oligarki, dan tirani. Konsep demokrasi begitu kuat sehingga telah menjadi keyakinan politik dibanyak negara diseluruh dunia, yang akhirnya bertransformasi menjadi sebuah isme.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, demokrasi merupakan suatu sistem kekuasaan yang kekuasaannya adalah atas pilihan rakyat, atau dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Sehingga segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa secara langsung adalah kebijakan oleh rakyat itu sendiri.

³⁰ Haedar Nashir, Pragmatisme Politik Kaum Elite,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm.37.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Semua penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data yang spesifik, tergantung pada masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas.³¹ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang. Pendekatan ini bersifat holistik (utuh) dari latar dan individu tersebut.³²

Jenis penelitian studi kasus dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatian pada latar belakang masalah dari situasi saat ini dari suatu peristiwa. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus merupakan deskripsi yang luas dan mendalam tentang suatu unit sosial. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, penelitian ini berlangsung dalam suasana yang alamiah. Kedua, peneliti sendiri merupakan alat dan sarana utama pengumpulan data. Ketiga, analisis data dilakukan secara induktif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa gambar dan kata-kata. Hal ini dikarenakan metode kualitatif diterapkan. Selain itu, semua yang dikumpulkan dianggap sebagai kunci dari apa yang diteliti. Penelitian ini

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

³² Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat memandang peluang partai politik lokal pada pemilu 2024 di provinsi Pidie Jaya. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada perlakuan terkontrol seperti pada penelitian eksperimental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan variabel dan kondisi 'apa yang ada' dalam situasi tertentu.³³

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi yang dapat menjadi dasar dari studi analisis dan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif meliputi data observasi, wawancara, dan dokumen. Dua jenis sumber data dalam penelitian ini: data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh, diolah dan disajikan sendiri oleh peneliti dari sumber-sumber primer. Yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan partai dan masyarakat setempat.

2. Data sekunder.

Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dan dipublikasikan oleh pihak-pihak pendukung dalam bentuk jurnal, publikasi, dan lain-lain. Data sekunder di sini mengacu pada data pendukung dalam penelitian, seperti dokumen dan berbagai bahan referensi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu purposive sampling, time sampling dan internal sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel

³³ Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.447.

dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita ketahui. Kita berharap, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subjek penelitian. Sampling internal adalah di mana peneliti mencoba untuk fokus pada ide-ide umum seperti apa yang akan diteliti, siapa yang akan diwawancarai, kapan observasi akan dilakukan dan dokumentasi apa yang dibutuhkan. Teknik pengambilan sampel time sampling, di sisi lain, melibatkan peneliti mengunjungi tempat dan informasi untuk mengumpulkan data berdasarkan waktu dan kondisi yang tepat.³⁴

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada persepsi masyarakat terhadap peluang partai lokal pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya, serta strategi partai politik lokal Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya. Berikut data-data responden sesuai dengan Dapil di Pidie Jaya, yaitu:

	Nama	Pekerjaan	Alamat
DAPIL I	Zakaria Husein	Pedagang	Meurah Dua
	Hj. Zainab M. Ali	Guru	Meurah Dua
	Ghivari Dermawan	Karyawan Swasta	Meureudu
	Tarmizi M. Ali	Petani	Ulim
DAPIL II	Sri Rahmini	Pegawai Honorer	Bandar Dua
	Mukhtar	Guru	Bamdar Dua

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 300.

	Aiyub	Petani	Jangka Buya
	Imran	Guru	Jangka Buya
DAPIL III	Rusli Mahmud	Petani	Bandar Baru
	Ilyas	Petani	Bandar Baru
	Ayu Fadira	Pedagang	Bandar Baru
	Heri Mirsal	Fresh Graduate	Bandar Baru
DAPIL IV	Basyah AB	Guru pengajian	Panteraja
	Nazaruddin	Petani	Panteraja
	Abdullah Pakeh	Pensiunan Guru	Trienggadeng
	Marzuwan, S.Pd	PNS	Trienggadeng
POLITISI	TGK. Muhibbuddin	DPW PNA	Meureudu

Tabel 31 Data-data Responden

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara ada beberapa macam yaitu: wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan wawancara semistruktur. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *key informan*, yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi secara detail. *Key informan* adalah informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah masyarakat Pidie Jaya yang diwakili oleh empat orang informan yang dipilih secara acak untuk setiap dapil (ada empat dapil di Pidie Jaya). Ini berarti total informan berjumlah 16 orang. Selain itu, satu informan mewakili politisi lokal.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan adalah dengan mewawancarai mereka, dan semua pertanyaan dan jawaban dari informan direkam dan di dokumentasikan. Untuk menghindari hilangnya informasi, peneliti menggunakan alat perekam dengan seizing informan. Setiap wawancara mendalam berlangsung selama 30 menit. Sebelum wawancara mendalam dimulai, peneliti memberikan penjelasan singkat dan jelas mengenai topik penelitian atau gambaran umum dan latar belakang penelitian.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat impersonal. Data impersonal adalah data yang sudah ada, yang dapat dimanfaatkan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Terdapat dua jenis dokumennya itu dokumen pribadi (catatan pribadi, otobiografi, buku harian) dan dokumen resmi (memo, instruksi, peraturan lembaga, jurnal, *newsletter*).³⁶

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 317.

³⁶ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 216.

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen yang memanfaatkan data documenter yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut dapat berupa arsip, transkrip wawancara, foto-foto hasil observasi, dll.

3.5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification*.³⁷

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti menyederhanakan data, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Maka dalam mereduksi data peneliti akan memilah kembali data yang sesuai dengan fokus penelitian dan mana yang tidak, data-data yang awalnya berupa catatan hasil wawancara akan disederhanakan dalam bentuk poin yang mudah dipahami.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dengan menyajikan data yang telah diperoleh akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi di lapangan. Dalam display data, peneliti harus menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 337-342.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara dan akan berubah apabila ditemukan kembali bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diperiksa untuk memastikan bahwa semua pihak dapat dipertanggungjawabkan dan hasil yang diperoleh dapat diandalkan. Dalam pemeriksaan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi adalah cara pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi diluar data tersebut sebagai bahan pertimbangan, dan triangulasi yang digunakan adalah:³⁸

1. Triangulasi data, yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Peneliti mencocokkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian dan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

2. Triangulasi riangulasi metode dilakukan dengan dua cara:

Peneliti mengecek keandalan temuan dari beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, di Kabupaten Pidie Jaya.

³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.331.

Kemudian peneliti mengecek tingkat reliabilitas dari beberapa sumber data dengan teknik pengumpulan data. Kedua jenis triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi analisis data kualitatif, dengan fokus pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teknik yang digunakan.

3.7. Panduan Penulisan

Adapun panduan penulisan ini ditulis agar tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa BAB yang terdiri dari beberapa sub antara lain:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu.

BAB II: Landasan teori yang berisi pengertian persepsi masyarakat, partai lokal Aceh, sejarah lahirnya partai lokal Aceh, peran partai lokal di Aceh dalam upaya penguatan demokrasi di Aceh, dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

BAB III: Pendekatan dan jenis penelitian, Jenis dan Sumber Data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan panduan penulisan.

BAB IV: Hasil penelitian yang berisi tentang persepsi masyarakat terhadap partai lokal Aceh, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Pidie Jaya

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Pidie. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 dengan Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini juga merupakan salah satu dari 16 usulan pemekaran kabupaten/ kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, yaitu: Kecamatan Pante Raja dengan Ibukota Keude Panteraja, Kecamatan Trienggadeng dengan Ibukotanya Keude Trienggadeng, Kecamatan Meureudu Ibukotanya Kota Meureudu, Kecamatan Meurah Dua Ibukotanya Simpang Peut, Kecamatan Ulim Ibukotanya Keude Ulim, Kecamatan Jangka Buya Ibukotanya Keude Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua Ibukotanya Ulee Gle dan Kecamatan Bandar Baru dengan Ibukotanya Lueng Putu, kemudian kabupaten ini juga terdiri dari 222 gampong, dengan total populasi 159.829 dan kepadatan $149/\text{km}^2$ ($390/\text{sqmi}$).

Letak Geografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada $4^{\circ}54'15,702''\text{N}$ sampai $5^{\circ}18'2,244''\text{N}$ dan $96^{\circ}1'13,656''\text{N}$ sampai $96^{\circ}22'1,007''\text{E}$. Batas wilayah kabupaten Pidie Jaya yaitu:

Utara	: Selat Malaka
Timur	: Kabupaten Bireun
Selatan	: Kabupaten Pidie
Barat	: Kabupaten Pidie. ³⁹

³⁹Web blog kkn.Unsyiah.ac.id/drien tujuh 8 diakses pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 23:06

4.2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia.⁴⁰ Jabatan-jabatan yang beraneka ragam seperti jabatan presiden/ eksekutif, wakil rakyat/ lembaga legislatif diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara tidak memaksa dengan melakukan retorika, komunikasi massa, dan lain hubungan publik. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.⁴¹

Pemilu 2024 yakni Pileg 2024 dan Pilpres 2024 beserta Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur berdasarkan keputusan yang berlaku. Pelaksanaan pemilu 2024 yakni jadwal Pileg dan Pilpres 2024 diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 (Rabu). Keputusan ini dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.⁴²

Dalam pemilu para pemilih disebut konsituen, dan kepada merekalah peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program yang dikampanyekan. Kampanye dilakukan selama kurun waktu yang telah ditentukan selama menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya setelah pemungutan suara dilakukan, maka proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh sistem penentuan pemenang yang telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta dan

⁴⁰Election(politicalscience),"Encyclopedia Britanica Online".Diakses tanggal 12 Februari 2023.

⁴¹ Arifin,Anwar. Pencitraan dalam politik,(Jakarta: pustaka Indonesia,2006). hal.39.

⁴²<https://news.detik.com/pemilu/> diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

telah disosialisasikan kepada pemilih.

Menurut UU No. 7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun baik sudah kawin atau belum.⁴³ Pada tahun 2019 terdapat tiga kategori pemilih yang dijadikan sebagai standar pemilu yaitu: pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus.

Pemilih tetap yaitu pemilih yang sudah terdata pada KPU dan juga telah terdata di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sedangkan pemilih tambahan merupakan kategori pemilih yang pindah dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). Kemudian yang dimaksud dengan pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap). Kategori pemilih ini dapat ikut memilih hanya dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).⁴⁴

4.3. Partai Politik Lokal

Partai politik lokal adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Aceh dan memiliki kepentingan tersendiri, untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan tersebut secara damai dan menjadi sebagian dari sebuah negara bangsa. Kepentingan tersebut diwujudkan dan diperjuangkan melalui penguasaan dari

⁴³ Putra, Dwi (2019). *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. hlm.1.

⁴⁴ Putra, Dwi (2019). *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: BAWASLU RI.hlm. 1-3.

jabatan politik atau pemerintah. Dan juga kepentingan tersebut dapat diperjuangkan melalui kontrol terhadap pemerintah melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui demonstrasi. Dari sisi pandang positif kehadiran partai lokal merupakan akomodasi aspirasi majemuk, tidak terkecuali aspirasi kewilayahan, yang ada dalam negara yang memiliki luas, hal yang justru amat membantu bagi penentu kebijakan Nasional. Terbentuknya partai politik lokal secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota (DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.⁴⁵

Kemudian Partai politik lokal ialah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota). Partai lokal sendiri tidak mempunyai pengurus ditingkat Nasional karena ruang lingkungannya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hanya mengakui adanya partai politik Nasional dan tidak mengakui partai politik lokal. Tidak hanya itu Undang-Undang tersebut juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan ditingkat Nasional yang berkedudukan di Ibukota negara.

Apabila ditelaah MoU tersebut terdapat beberapa poin-poin penting perjanjian diantaranya: *Pertama*, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat Aceh, termasuk GAM untuk menjalankan pemerintahan di Aceh dengan kewenangan yang sangat besar melalui otonomi khusus, namun

⁴⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Pemerintah Indonesia memberikan intensif kepada para anggota GAM berupa pemberian lahan-lahan perkebunan dan pertanian di daerah utara dan timur Aceh yang akan di distribusikan kepada para anggota GAM. *Ketiga*, Pemerintah Indonesia akan memberikan pengampunan (amnesti) kepada seluruh anggota GAM dengan syarat para anggota GAM menyerahkan seluruh senjata yang mereka miliki selama berperang. Pemberian amnesti juga diikuti oleh pemberian hak sipil dan politik secara penuh kepada para anggota GAM. *Keempat*, dalam konteks pemenuhan hak sipil dan politik tersebut, MoU juga menyetujui agar ditumbuhkan partai politik lokal di Aceh. Salah satu kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1 (Partisipasi Politik) MoU Helsinki adalah:

“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, ataupun lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan member sumbangan positif bagi maksud tersebut.”⁴⁶

Untuk kesiapan pemilu tahun 2024 mendatang, partai politik lokal Aceh yang akan menjadi peserta pemilu terdapat 6 partai dan 17 partai politik nasional. Berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 Tahun 2022 dan berdasarkan Berita Acara Nomor:310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik. Kemudian penetapan

⁴⁶<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>. di akses pada tanggal 10 Februari 2023.

partai politik peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, yakni penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan 14 bulan sebelum pemungutan suara.⁴⁷ Terdapat 8 (delapan) partai politik yang lolos parlemen 2019 masih menggunakan nomor urut lama, sedangkan yang lainnya menggunakan nomor urut berdasarkan undian. Merujuk pada Perppu Pemilu Nomor 1 Tahun 2022, pemberian nomor urut parpol peserta pemilu dilakukan melalui dua mekanisme. Berikut 17 (tujuh belas) partai politik nasional yang terdaftar adalah:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

⁴⁷www.KPU.go.id. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 05:24 WIB.

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sedangkan partai politik lokal Aceh yang terdaftar sebagai berikut:

18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Setelah Partai Politik Lokal (Parlok) di Aceh dibentuk ada beberapa parlok yang sudah terdaftar di Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Aceh adalah Partai GAM, Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat), Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PS-PNS), Partai Darussalam, Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Daulat Aceh (PDA) dan Partai Pemersatu Muslimin Aceh (PPMA). Hal ini memang ditegaskan karena parlok dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang amat sempit tersebut. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai lokal saja karena hanya sebegitu kemampuannya atau partai lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminta mengajukan calon dalam pemilu tingkat lokal (bahkan hanya di satu provinsi).⁴⁸

Kehadiran partai politik lokal penting bagi proses transisi politik Aceh. Terdapat beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi

⁴⁸<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 11:38 WIB.

memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Kehadiran partai politik lokal juga menjadi sebuah cerminan bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang telah terjadi selama ini tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun berlangsung secara formal dan terdapat partai politik, parlemen dan pemilu. Saat ini banyak aktifis partai politik yang bergabung dan membentuk partai lokal dibandingkan dengan memperkuat partai politik nasional yang telah mapan.

4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Munculnya partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu *design* dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Terdapat beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa aspirasi partai politik lokal untuk Aceh telah dibentuk semenjak tahun 1992, dan mereka sudah mempelajari tentang partai-partai lokal di Eropa. Partai politik lokal juga terdapat di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, partai politik lokal disana yaitu partai yang berbasis di daerah, untuk kepentingan daerah, dan ikut terlibat dalam proses politik daerah. Kemudian konsep partai politik inilah yang diangkat menjadi contoh bagi Pemerintah Indonesia.

Partai politik lokal adalah salah satu kebanggaan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka menyelesaikan konflik politik NAD dengan damai. Adanya bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam, menjadikan suatu momentum untuk duduk satu meja dalam perundingan yang damai. MoU antara pemerintah RI dengan GAM merupakan salah satu kemajuan yang signifikan bagi penyelesaian konflik kurang lebih 30

tahun. Secara umum berdasarkan tujuannya, partai politik lokal dapat dikelompokkan menjadi partai politik yang mengadvosikan hak-hak minoritas, menegaskan otonomi daerah dan memerdekakan diri, dan kehadiran partai politik lokal Aceh tidak didukung berdasarkan UU parpol. Meskipun demikian, bukan berarti partai politik tidak dapat hadir, tidak ada larangan parpol lokal untuk muncul.

Kehadiran partai politik lokal sangat diharapkan dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi partai politik secara ideal adalah untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing dan menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara damai. Sedangkan fungsi partai politik terhadap negara yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif dan terdapat partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dan fungsi partai politik untuk rakyat adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi dan nilai-nilai pada masyarakat. Berikut adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya masa jabatan 2014-2019 dan 2019-2024.⁴⁹

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	1
GERINDRA	1	3
GOLKAR	0	1
NASDEM	4	3
PKS	1	0
PPP	2	2

⁴⁹ <https://Kip.acehprov.go.id>.di akses pada tanggal 15 Februari 2023.

PAN	4	4
DEMOKRAT	0	1
PARTAI ACEH	9	8
PDA	1	0
PNA	1	2
PBB	1	0
Jumlah Anggota	25	25
Jumlah Partai	10	9

4.1 Data Jumlah Kursi dalam Periode 2014-2024.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Pidie Jaya pada setiap periode berjumlah 25 kursi dengan jumlah partai yang berbeda. Namun yang menduduki kursi jabatan bukan hanya dari partai lokal Aceh tetapi juga termasuk partai nasional.

4.4.1. Persepsi masyarakat Terhadap Peluang Partai Lokal Aceh pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Menurut Teori Gestalt persepsi dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat arsitektural dan didasarkan pada asumsi secara menyeluruh bahwa manusia membaca makna bentuk atau melodi masuk ke dalam persepsi melebihi jumlah sensasi-sensasi individual sehingga manusia melihat obyek (tanda, simbol dan lain-lain) sebagai suatu kesatuan dan tidak mampu membedakannya bagian per bagian. Kelemahan teori ini adalah dalam hal waktu dan pengamatan yang berulang, bila seseorang mempergunakan waktu yang agak lama dalam merekam obyek, maka semakin lama mengamati semakin mungkin seseorang melihat bagian perbagiannya dan semakin dapat membedakannya, apalagi bila

pengamatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.⁵⁰ Berikut faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi dibagi menjadi dua, yaitu:

- Faktor Internal: Perasaan, pengalaman, motivasi, kerangka acuan, dan kemampuan berpikir.
- Faktor Eksternal: stimulus dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Selanjutnya teori Gestalt dapat dipahami seperti pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gestalt
Sumber : Bell, 2001

Kemudian terkait pengertian masyarakat, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, dan kesadaran masyarakat. Persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah pengetahuan lingkungan dari sejumlah individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain, yang mempunyai nilai norma-norma dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama dalam adat-istiadat yang terikat dengan suatu identitas bersama yang diperoleh melalui indera.

Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KIP Pidie Jaya menjelaskan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 113.430 orang untuk pemilu 2024 mendatang, jumlah ini mengalami kenaikan 1.709 orang dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Jumlah TPS pemilu 2024 bertambah 25 TPS dari pemilu-pemilu sebelumnya 475 TPS menjadi 490 TPS, berdasarkan hasil pemetaan yang

⁵⁰ Bell AP, Greene CT, Fisher DJ & Baum A, 2001, Environmental Psychology, 5th edition, Harcourt College Publisher, Orlando.

dilakukan oleh KIP Pidie Jaya di delapan kecamatan tercatat semuanya mengalami perubahan jumlah TPS. Dirincikan sebagai berikut, Kecamatan Meureudu dari 68 TPS menjadi 69 TPS, Ulim dari 51 TPS menjadi 53 TPS, Jangka Buya dari 30 TPS menjadi 33 TPS, Bandar Dua dari 86 TPS menjadi 87 TPS, selanjutnya Meurah Dua dari 37 TPS menjadi 39 TPS, kemudian Bandar Baru 110 TPS menjadi 111 TPS, Panteraja dari 24 TPS menjadi 26 TPS dan Trienggadeng 69 TPS menjadi 72 TPS. Kemudian jumlah daerah pemilihan (dapil) yang ada di Pidie Jaya terdapat empat dapil, yaitu:⁵¹

Daerah Pemilihan	Wilayah Dapil	Alokasi Kursi
Dapil I	Meurah Dua, Meureudu, Ulim	8
Dapil II	Bandar Dua, Jangka Buya	6
Dapil III	Bandar Baru	6
Dapil IV	Panteraja, Trienggadeng	5

Tabel 4.2 Alokasi kursi dan Wilayah Dapil

Persepsi politik rakyat Aceh yang telah terpuaskan dengan adanya partai politik lokal yang mengharapkan adanya perubahan politik. Dibalik semua pengetahuan masyarakat terhadap partai politik lokal masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang partai politik lokal baik itu jumlah partai, dan hal-hal yang berkaitan dengan partai lainnya. Merujuk pada jawaban-jawaban yang telah peneliti wawancarai banyak temuan-temuan lapangan yang dijelaskan oleh informan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zakaria Husein selaku masyarakat perwakilan Dapil I:

⁵¹<https://acehprov.go.id/> Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi (Perdatin) KIP Pidie Jaya, Masykur.

“...Dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, sangat banyak anggota-anggota partai politik lokal yang mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat pada dapil penempatan masing-masing. Kami selaku masyarakat awam yang kurang dalam segala aspek pengetahuan, kami merasa sangat terbantu dengan adanya perwakilan anggota atau ketua partai politik lokal. Kami merasa ada tempat mengadu terkait permasalahan yang kami hadapi baik itu yang berhubungan dengan ranah politik ataupun pemerintahan. Menurut saya perbedaan antara partai politik lokal dengan partai politik nasional (parnas) itu hanya pada visi misi, dan partai politik lokal lebih identik dengan anggota atau ketua yang berasal dari Aceh atau GAM”.⁵²

Hasil wawancara salah satu masyarakat pada dapil I, bapak Zakaria Husein berpendapat bahwa yang akan lebih unggul dalam pemilu 2024 ini adalah dari Partai Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai beberapa anggota dewan yang dipilih untuk menjadi informan. TGK. Muhibuddin husen sapaan akrab Guree pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Kabupaten Pidie Jaya. Penunjukan Muhibuddin sebagai Ketua dan Muhammad Isa serta Fakrullazi sebagai Sekretaris dan Bendahara DPW PNA Pidie Jaya berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh Nomor 626/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022 tentang Pembekuan Kepengurusan dan Penunjukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 2 Februari 2022.

“...Parlok identik dengan Aceh, partai lokal Aceh sendiri merupakan buah perjanjian damai antara pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sesuai dengan perjanjian damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Aceh sendiri diberi hak untuk mendirikan partai politik lokal. Keberadaan partai lokal di Aceh sangat berpengaruh untuk kemaslahatan rakyat Aceh, karena lahirnya partai lokal untuk memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat Aceh dan hadirnya partai lokal mampu mempresentasikan perwakilan masyarakat. Namun untuk peluang kemenangan yang akan banyak menduduki alokasi kursi yang telah

⁵²Wawancara Zakaria Husein Dapil I pada tanggal 15 Februari 2023.

ditetapkan itu masih dipertanyakan, dilihat dari semangatnya para bakal calon anggota DPR mulai mengkampanyekan dirinya masing-masing baik itu dari partai politik local Aceh maupun partai politik nasional.”⁵³

Dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu anggota DPW partai PNA Kabupaten Pidie Jaya, untuk perwakilan anggota partai yang akan menduduki alokasi kursi yang telah ditetapkan belum dapat dipastikan, dilihat dari ketatnya persaingan dalam mendapatkan kursi dan memperoleh suara yang tinggi. Harapannya kepada semua bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu bersaing dengan sehat dalam memperoleh suara yang tinggi, tidak adanya konflik antara kubu lain, dan terhindar dari pertikaian.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahmini tentang persepsi masyarakat terhadap partai politik lokal Aceh pada pemilu 2024 mendatang yaitu sebagai berikut:

“... Menurut saya partai politik lokal Aceh yang akan unggul kembali pada pemilu 2024 mendatang adalah Partai Aceh, dilihat dari tahun sebelumnya Partai Aceh lebih unggul.”⁵⁴

Kemudian hasil wawancara saya dengan Bapak Imran selaku guru pada SMPN 2 Meureudu, yaitu sebagai berikut:

“...Untuk partai yang akan unggul di pemilu tahun 2024 menurut saya adalah Partai Nanggroe Aceh, karena banyak dari segi anggota partainya saja sangat membantu masyarakat dan mendengar segala keluhan rakyat. Saya tidak tahu bagaimana aspirasi partai yang lain, tapi secara pribadi menurut saya PNA akan unggul pada pemilu kedepan ini.”⁵⁵

⁵³ Wawancara TGK.Muhibuddin husen pada tanggal 15 Februari 2023.

⁵⁴ Wawancara Sri Rahmini pada tanggal 15 Februari 2023.

⁵⁵ Wawancara Imran pada tanggal 17 Februari 2023.

Selanjutnya hasil wawancara saya dengan Ibu Ayu Fadira menerangkan bahwa:

“.... Menurut saya partai politik lokal Aceh yang akan menang pada pemilu 2024 nanti adalah Partai Aceh, partainya sudah dikenal luas oleh masyarakat yang ada di seluruh Aceh. Partai Aceh banyak memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang ada di perdesaan, bahkan yang orang tuanya sudah meninggal saat konflik GAM dulu, diberikan bantuan oleh anggota Partai Aceh. Semoga di Aceh tidak akan terjadi lagi pertumpahan darah seperti pada saat MoU belum disahkan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir rata-rata masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya lebih berpihak ke partai politik lokal Aceh tepatnya yaitu Partai Aceh (PA). Dengan alasan pemilihan mereka berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan yaitu memilih wakil rakyat yang benar bisa menjadi tempat mengadu dan memberikan aspirasi kepada rakyat.

4.4.2. Strategi Partai Lokal Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya

Dalam strategi partai politik dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye. Namun, kampanye yang biasanya dilakukan partai hanya sekedar kampanye pemilu bukan kampanye politik yang hasilnya akan lebih signifikan. Menurut Firmanzah ada beberapa perbedaan krusial antara kampanye pemilu dan kampanye politik, sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Wawancara Ayu Fadira Dapil III pada tanggal 16 Februari 2023.

⁵⁷ Firmanzah. Marketing Politik: Strategi Alternatif Partai Politik, www.mardetymardinsyah.com/wp-content/uploads/2012/03/marketing_politik_firmanzah.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

	Kampanye Pemilu	Kampanye Politik
Jangka dan batas waktu	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
Tujuan	Mendapat Suara	Citra politik
Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung Push-Marketing	Membangun dan membentuk reputasi politik Pull- Marketing
Komunikasi publik	Satu arah, janji dan harapan politik bila memenangkan pemilu	Interaksi untuk pemahaman dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat
Sifat hubungan antara kandidat dan pemilih	Pragmatis/ transaksi	Hubungan relasional
Produk politik	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi Ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai
Sifat program kerja	<i>Market-Oriented</i> dan berubah-ubah dari pemilu satu ke pemilu lainnya	Konsisten dengan sistem nilai partai
Retensi memori kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
Sifat kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas lainnya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

Tabel 4.3 Perbedaan Strategi Kampanye

Menurut Arifin dalam ardial menyatakan bahwa strategi politik yaitu semua keputusan yang disesuaikan pada keadaan saat ini tentang perilaku yang akan digunakan untuk mencapai tujuan politik dimasa yang akan mendatang. Sedangkan makna lain dari strategi adalah ilmu tentang cara penggunaan

pertempuran untuk mencapai suatu kemenangan dalam perang.⁵⁸ Selanjutnya teori pembangunan yang di kemukakan oleh Huntington,⁵⁹ bahwa partai politik juga harus mengikuti proses modernisasi segala aspek. Maka dari itu, partai politik dapat memperkenalkan diri dan juga harus menyesuaikan *Branding-Politic* nya dengan era sekarang. Menurut Hj. Zainab M. Ali sebagai salah satu guru yang peneliti wawancarai:

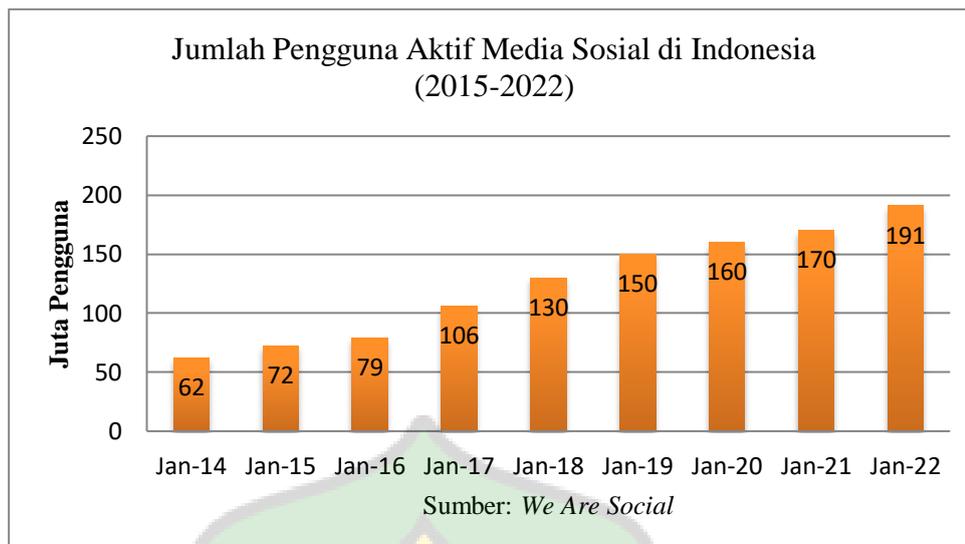
“...Keberadaan partai politik sendiri saya lihat sangat membantu masyarakat, hanya saja tidak semua persoalan-persoalan teratasi sesuai dengan harapan masyarakatnya. Untuk peluang partai politik lokal pada pemilu yang akan datang sepertinya akan di dominankan oleh partai politik lokal Aceh, sementara partai nasional akan minim. Saran saya kepada partai politik lokal Aceh, agar masyarakat lebih mengenal tentang partai tersebut maka anggota partai dapat memperkenalkan dirinya melalui dunia maya/ media sosial. Karena pengaruh dari media sosial itu sangat pesat, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui/ kenal dengan anggota partai politik, jadi lebih mengenal sehingga mereka tidak bingung dalam mencoblos pada saat pemilu nanti.”⁶⁰

Saat ini media sosial dijadikan salah satu arena kampanye ataupun *branding politic* para kandidat. Semenjak pemilu 2014-2019 diselenggarakan, arena media menjadi peran penting dalam mengubah perilaku politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data peningkatan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia dari tahun 2014-2022, jelas bahwa anggota partai politik lokal dapat memperkenalkan dirinya melalui akun-akun media sosial.

⁵⁸Ardial, 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta : Indeks

⁵⁹ Encup Supriatna, *Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.15.

⁶⁰Wawancara Hj. Zainab M. Ali Perwakilan Dapil I pada tanggal 16 Februari 2023.



Gambar 4.2 Peningkatan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia dari tahun 2014-2022

Berdasarkan data *We Are Social*, dapat dilihat bahwa peningkatan pengguna aktif media sosial di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 191 juta jiwa. Saat ini generasi yang melek akan media sosial di dominasi oleh milenial, yang kemudian dapat dijadikan sasaran dalam mendulang surapolitik pada saat pemilu 2024 mendatang. Kalangan milenial juga dijuluki sebagai *digital narrative*, artinya mereka sudah sangat familiar dengan teknologi informasi baik internet ataupun media sosial lainnya.⁶¹ Keberhasilan sebuah strategi politik dapat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pada saat pemilu nanti, strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan suatu tujuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heri Mirsal selaku *Fresh Graduate*, yaitu sebagai berikut:

“...Kampanye antar partai saat ini sudah sangat banyak beredar poster-poster dan baliho yang terpampang dimana-mana setiap sudut jalan. Namun setelah saya perhatikan dengan mempromosikan partai melalui spanduk, sticker itu sangat menguras kantong anggota partai, mereka memerlukan

⁶¹Pramelani, & Widyastuti, T. (2021). Persepsi Milenial terhadap Gaya Kepemimpinan Calon Presiden Tahun 2024. *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20 No.

modal yang cukup besar untuk itu. Namun bagaimana jika mereka tidak menang, pasti sangat depresi dengan jumlah uang yang sangat besar telah dikeluarkan. Menurut saya mempromosikan partai atau pribadi independen anggota partai dengan cara iklan, atau menggunakan media sosial sangat efektif dan menghemat pengeluaran, dan dana yang tersebut bisa dipakai untuk kepentingan lainnya.⁶²

Menurut Nursal dalam Firmanzah⁶³ terdapat beberapa strategi kampanye politik yaitu:

1. *Push political*: Strategi ini berfokus pada isu-isu yang penting bagi pemilih, bukan sekadar menjual kandidat dan partai. Strategi ini tidak hanya menjual kandidat dan partai sebagai komoditas, tetapi juga sebagai pemilih, dan ini adalah sebuah komoditas. Pesan-pesan komunikasi dari strategi ini dapat disampaikan secara langsung oleh kandidat atau partai, atau melalui relawan yang datang membagikan brosur, selebaran, stiker, dan lain-lain. Relawan ini juga bertanggungjawab untuk mengumpulkan data berupa persepsi pemilih, mengukur dampak pesan, dan mencatat perubahan sikap dan perilaku. Relawan ini juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data berupa persepsi pemilih, mengukur dampak pesan dan mencatat perubahan sikap dan perilaku pemilih. Strategi ini sangat mudah untuk diterapkan dalam kasus pemilihan kepala daerah.
2. *Pull political*: Strategi yang paling sering digunakan oleh partai politik dan kandidat. Strategi ini menyampaikan pesan melalui media massa, termasuk media elektronik dan cetak, media luar, mobile, dan internet. Strategi ini dapat menyampaikan pesan kepada banyak orang, tetapi tidak dapat diukur

⁶² Wawancara Heri Mirsal. Pada tanggal 16 Februari 2023.

⁶³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007

efektivitasnya. Kepada banyak orang, namun efektivitasnya tidak dapat diukur. Selain itu, strategi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan hanya dapat dilakukan oleh partai atau kandidat yang memiliki banyak uang.⁶⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh tokoh diatas dan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variasi strategi politik dalam mengkampanyekan anggota partai politik lokal terkait. Dalam wawancara dengan Tarmizi M.Ali salah satu perwakilan pada Dapil I:

“.....saya mengetahui sedikit tentang sejarah pembentukan partai politik lokal Aceh. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya belajar lagi tentang partai politik lokal Aceh tersebut. Untuk keberadaan partai politik lokal di Aceh sendiri sangat membantu masyarakat Aceh, hanya saja masih banyak yang berasumsi bahwa partai lokal Aceh tersebut hanya membantu pihak-pihak tertentu saja, dan untuk dapat bergabung ke dalam sebuah pemerintahan dan lainnya perlu dukungan/ rekomendasi dari pihak partai politik lokal Aceh langsung. Sangat jelas terlihat adanya perbedaan antara partai politik lokal Aceh dengan partai nasional khususnya di Aceh. Untuk peluang dalam pemilu 2024 mendatang sepertinya partai politik lokal Aceh akan lebih unggul dibandingkan partai nasional. Namun untuk dapat mengambil hati rakyat dalam memperoleh suara yang tinggi pada saat pemilu, sebaiknya para anggota politik lokal mengkampanyekan dirinya dengan mendatangi desa-desa, menempel sticker, jangan mereka dekat masyarakat disaat sudah mau pemilu saja, sebelumnya mereka kemana?.”⁶⁵

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kampanye secara manual lebih dapat meyakinkan masyarakat dalam memilih calon anggota DPR/DPRK pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian hasil wawancara dengan

⁶⁴Dalam Tesis Inco Hary Perdana, Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 Studi Kasus:Strategi Pemenangan Partai Nasdem, FISIP UI Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik. h. 45-46.

⁶⁵Wawancara Tarmizi M.Ali , Perwakilan Dapil .I pada tanggal 16 Februari 2023.

Bapak Mukhtar selaku guru pada SMA 1 Negeri Pidie Jaya, tentang strategi partai lokal Aceh dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut:

“... Strategi yang dilakukan oleh partai politik lokal dalam mempromosikan partainya adalah dengan cara kampanye yang mengumpulkan sejumlah masyarakat-masyarakat pada ruang terbuka, karena menurut saya masyarakat senang dengan adegan seperti itu, di bandingkan partai politik yang mempromosikan partainya melalui media sosial.”⁶⁶

Dan hasil wawancara saya dengan Bapak Aiyub selaku perwakilan masyarakat pada dapil II yaitu sebagai berikut:

“....Saya lebih suka dengan partai politik lokal yang kampanye di lapangan seperti pada pemilu sebelumnya, menurut itu sangat bisa menarik perhatian masyarakat, karena pada saat kampanye berlangsung para tamu (masyarakat) mendapat doorprize baik itu baju partai atau bingkisan lainnya.”⁶⁷

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ghivari Dermawan selaku salah satu pegawai swasta di Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut:

“.... Saya hanya mengetahui Partai Aceh saja kebetulan saya penduduk baru di Kabupaten Pidie Jaya, jadi saya hanya memihak ke Partai Aceh saja. Untuk strategi Partai Aceh dalam memperoleh suara terbanyak untuk pemilu 2024 nanti, sepertinya mereka tidak perlu strategi lagi, karena hampir semua masyarakat Aceh mengetahui tentang partai Aceh. Namun berbeda dengan partai politik lokal yang lain, yang harus mencari strategi-strategi khusus dalam mempromosikan partainya.”⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Pakeh sebagai salah satu Pensiunan guru pada pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut:

“...Menurut saya strategi partai dalam mengkampanyekan partainya guna

⁶⁶ Wawancara Mukhtar Perwakilan Dapil II pada tanggal 17 Februari 2023.

⁶⁷ Wawancara Aiyub Perwakilan Dapil II pada tanggal 17 Februari 2023.

⁶⁸ Wawancara Ghivari Dermawan Perwakilan Dapil I pada tanggal 16 Februari 2023.

menarik masyarakat untuk memilih partainya pada saat pemilu nanti, itu cukup dengan mengadakan pertemuan publik seperti kampanye pada umumnya. Karena jika anggota partai politik itu berkampanye melalui media sosial itu kurang efektif, karena masyarakat tidak dapat berinteraksi langsung dengan anggota partai. Kemudian saya harap kepada calon anggota partai yang terpilih pada pemilu 2024 mendatang dapat menjadi perwakilan rakyat yang tidak mengecewakan rakyat-rakyatnya.⁶⁹

Hasil observasi, wawancara dan survei yang diperoleh dari perwakilan masyarakat di empat daerah pemilihan di Pidie Jaya menunjukkan tingkat keingintahuan yang tinggi terhadap partai lokal di Aceh. Sebagian besar masyarakat mengetahui sejarah pembentukan partai lokal di Aceh dan meyakini bahwa pembentukan partai lokal memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk menciptakan situasi yang damai di Aceh dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Partai lokal harus diposisikan sebagai wadah masyarakat untuk merespon dan mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, bukan mengedepankan kepentingan individu, sebagian orang atau kelompok tertentu. Secara alamiah, masyarakat harus melihat manfaat dan keuntungan dari kehadiran partai lokal di tengah-tengah mereka, tidak hanya dalam kampanye pra-pemilu, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

⁶⁹ Wawancara Abdullah Pakeh Dapil IV pada tanggal 16 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

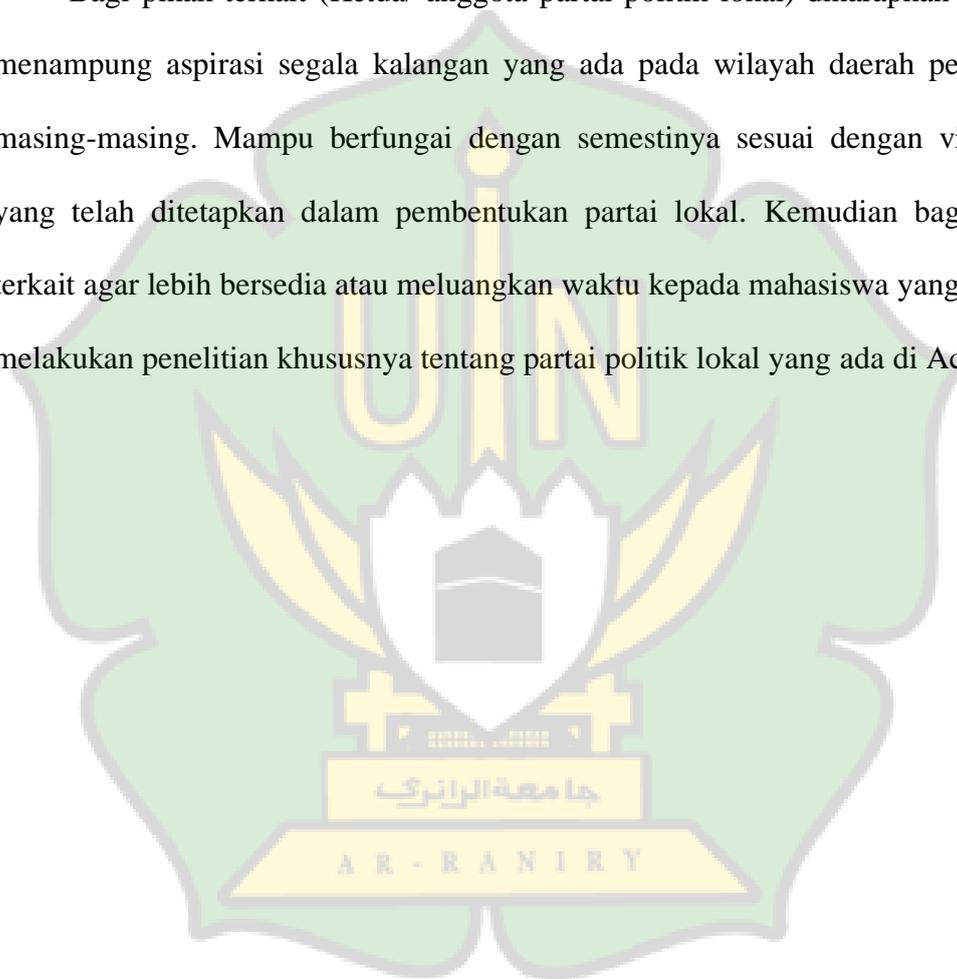
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dan mengacu pada bab IV yaitu tentang pembahasan dan juga hasil wawancara dari sumber terkait maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi merupakan praduga yang muncul akibat mendengar, melihat serta mengetahui tentang suatu objek. Masyarakat dapat berpersepsi terhadap keberadaan partai politik lokal Aceh karena mereka pernah melihat, mendengar dan mengetahui tentang partai politik lokal tersebut. Partai politik lokal menjadi salah satu partai yang akan unggul dalam hasil pemilu 2024 mendatang, sesuai dengan hasil wawancara dari setiap informan yang telah diwawancarai. Sangat banyak harapan-harapan masyarakat dalam memilih anggota dewan yang akan dipilihnya. Namun untuk partai yang perolehan kursi terbanyak menurut hasil wawancara masyarakat dan akademisi masih diungguli oleh Partai Aceh
2. Sebagian informan yang telah diwawancarai, masih ada yang belum mengetahui tentang partai politik lokal. Tetapi mereka punya keinginan yang tinggi, dan masyarakat juga beranggapan bahwa terbentuknya partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan yang baik dalam menciptakan perdamaian di Aceh. Salah satu cara untuk meraih suara yang banyak dalam pemilu, maka pihak anggota/ partai politik dapat memperkenalkan partainya melalui media sosial, sticker, dsb.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dengan judul persepsi masyarakat terhadap peluang partai lokal pada pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya, penulis memberikan saran/ masukan yang sangat perlu untuk di perhatikan terutama bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

Bagi pihak terkait (Ketua/ anggota partai politik lokal) diharapkan mampu menampung aspirasi segala kalangan yang ada pada wilayah daerah pemilihan masing-masing. Mampu berfungsi dengan semestinya sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan dalam pembentukan partai lokal. Kemudian bagi pihak terkait agar lebih bersedia atau meluangkan waktu kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian khususnya tentang partai politik lokal yang ada di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. (Jakarta: Penerbit Suara Bebas,2006), hlm. 313.
- Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh (Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan)*, (Jakarta: Publisher Kemitraan, 2008), hlm.13.
- Ardial, 2010.*Komunikasi Politik*, Jakarta : Indeks
- Ari H.Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.14.
- Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.447.
- Arifin,Anwar. *Pencitraan dalam politik*,(Jakarta: pustaka Indonesia,2006). hal.39.
- Ary Donald, *An Invintation to research in Sosial Education* (Bacerly Hillx: Sage Publication,2002), hlm. 424.
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 199.
- Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 88
- Clifford T Morgan, Op.cit. hlm. 229.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2011), hlm. 116.
- E.Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah PROFISIONAL, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004, hlm.170.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.) 2007
- Gibson, M., 2001, *Pharmaceutical Preformulation and Formulation*, 546-550
- Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 37.
- Hamdan Basyar, *Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008),hlm. 265.
- Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Mudake Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm.174-175.
- Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya,

- 2015), hlm.50.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru,1979), hlm.157.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.331.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 216.
- Mochtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 54.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi tentang Integrasi Politik dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), hlm. 20.
- Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hlm.21.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304.
- Putra, Dwi (2019). *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. hlm.1.
- Putra, Dwi (2019). *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: BAWASLU RI.hlm. 1-3.
- R.A.Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 13.
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986), hlm. 3.
- Sugeng Hadiwinata (et.al), *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*, (Jakarta: Friedrich Eberto Stiftung, 2010), hlm. 213.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2013), hlm.300.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*

R&D (Bandung: Alfabeta,2013), hlm.317.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2013),hlm.337-342.

Urofsky, Melvin. *Prinsip-prinsip dasar Demokrasi dalam politik, demokrasi dan manajemen komunikasi.* (Yogyakarta: Galang Press, tahun 2002).

Wahid murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan,* (Malang: UM Press, 2008), hlm. 41.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, cetke-II,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 100.

Wirawan, *Kepemimpinan:Teori, Psikologi, Aplikasi dan Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Press,2010), hlm. 751.

Yaya Mulyana dan Sarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hlm. 58-59.

Skripsi dan Tesis:

Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Nanggroe Aceh Darussalam,* Thesis, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2017.

Inco Hary Perdana, *Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 Studi Kasus:Strategi Pemenangan Partai Nasdem, FISIP UI Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik.* hlm. 45-46.

Muhammad Djafar, *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,*Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). hlm, 115-117.

Jurnal:

Asda Rasida,dkk., *Partai Politik Lokal Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Jurnal Varia Justicia:Vol 12 No.2, 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.10.

Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5, No.1 Oktober2007, (Semarang: Fakultas

UNTAG Hukum, 2007), hlm.54.

Elidar Sari, *Keberadaan Partai Politik Lokal di Indonesia: Kajian Terhadap Partai Politik Lokal di Aceh*, Jurnal Suloh: Vol. 6, 2 Agustus 2008, hlm.4.

Feisal Akbar dan Mujibussalim, *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*, Jurnal Ilmiah FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 230-247 Juli 2017.

Muhammad Siddiq Armia, *Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 07, Nomor 01, UIN Ar-Raniry, Juni 2017.

Pramelani & Widyastuti, T. (2021). *Persepsi Milenial terhadap Gaya Kepemimpinan Calon Presiden Tahun 2024*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No.

Rudi Hardi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Otoritas, Vol.1 No.1 April 2011, hlm.53-55.

Perundang-Undangan:

Lembaran Negara Republik Indonesia No.4633, Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 75.

Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 62, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 75 ayat 1 s/d 8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Artikel/ Website Resmi:

Bell AP, Greene CT, Fisher DJ & Baum A, 2001, *Environmental Psychology, 5th edition*, Harcourt College Publisher, Orlando.

CRC Press, United States of America

Election (political science), *"Encyclopedia Britanica Online"*. Diakses tanggal 12 Februari 2023.

<https://acehprov.go.id/> Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi (Perdatin) KIP

Pidie Jaya, Masykur.

<https://anteroAceh.com/news/berikut-ini-nama-nama-anggota-dpra-periode-2019-2024-yang-resmi-dilantik/index.html>, diakses kembali pada Tanggal 07-September-2022.

<https://dataindonesia.id>, 2022 di akses pada tanggal 20 Februari 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Kabupaten_Pidie_Jaya.
di akses pada tanggal 15 Februari 2023.

<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>. di akses pada tanggal 10 Februari 2023.

<https://news.detik.com/pemilu/> diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 11:38 WIB.

<https://www.ajnn.net/news/24-dari-25-anggota-dprk-pidie-jaya-periode-2019-2024-dilantik/index.html>. diakses kembali pada Tanggal 07-September-2022.

<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20220815163818-32-834878/6-partai-lokal-terdaftar-di-kip-Aceh-untuk-pemilu-2024>. diakses kembali pada Tanggal 07-September-2022.

Manaf, “PA Milik Masyarakat Dalam Naungan NKRI” dalam Serambi Indonesia, (Koran Serambi pada Tanggal 25 Juni 2013), hlm. 7.

Web blog kkn.Unsyiah.ac.id/drien tujoh 8 diakses pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 23:06 WIB.

www.KPU.go.id. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 05:24 WIB.

Hasil Wawancara:

Wawancara Aiyub Perwakilan Dapil II pada tanggal 17 Februari 2023.

Wawancara Ghivari Dermawan Perwakilan Dapil I pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara Sri Rahmini Dapil II pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara Imran Dapil II pada tanggal 17 Februari 2023.

Wawancara Mukhtar Perwakilan Dapil II pada tanggal 17 Februari 2023.

Wawancara Abdullah Pakeh Dapil IV pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara Hj. Zainab M. Ali Perwakilan Dapil I pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara Tarmizi M.Ali , Perwakilan Dapil I pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara TGK.Muhibuddin husen pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara Ayu Fadira Dapil III pada tanggal 16 Februari 2023.

Wawancara Zakaria Husein Dapil I pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara Heri Mirsal Dapil III pada tanggal 16 Februari 2023.



LAMPIRAN

Lampiran I: Hasil wawancara per Dapil

Nama	Pekerjaan	Wawancara
Zakaria Husein	Pedagang	<p>“Dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, sangat banyak anggota-anggota partai politik lokal yang mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat pada dapil penempatan masing-masing. Kami selaku masyarakat awam yang kurang dalam segala aspek pengetahuan, kami merasa sangat terbantu dengan adanya perwakilan anggota atau ketua partai politik lokal. Kami merasa ada tempat mengadu terkait permasalahan yang kami hadapi baik itu yang berhubungan dengan ranah politik ataupun pemerintahan. Menurut saya perbedaan antara partai politik lokal dengan partai politik nasional (parnas) itu hanya pada visi misi, dan partai politik lokal lebih identik dengan anggota atau ketua yang berasal dari Aceh atau GAM”</p>
Hj. Zainab M. Ali	Guru	<p>“.....Keberadaan partai politik sendiri saya lihat sangat membantu masyarakat, hanya saja tidak semua persoalan-persoalan teratasi sesuai dengan harapan masyarakatnya. Untuk peluang partai politik lokal pada pemilu yang akan datang sepertinya akan di dominankan oleh</p>

DAPIL I

			<p>partai politik lokal Aceh, sementara partai nasional akan minim. Saran saya kepada partai politik lokal Aceh, agar masyarakat lebih mengenal tentang partai tersebut maka anggota partai dapat memperkenalkan dirinya melalui dunia maya/ media sosial. Karena pengaruh dari media sosial itu sangat pesat, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui/ kenal dengan anggota partai politik, jadi lebih mengenal sehingga mereka tidak bingung dalam mencoblos pada saat pemilu nanti.</p>
<p>Ghivari Dermawan</p>	<p>Karyawan Swasta</p>		<p>“Saya hanya mengetahui partai Aceh saja kebetulan saya penduduk baru di Kabupaten Pidie Jaya, jadi saya hanya memihak ke Partai Aceh saja. Untuk strategi Partai Aceh dalam memperoleh suara terbanyak untuk pemilu 2024 nanti, sepertinya mereka tidak perlu strategi yang banyak karena hampir semua masyarakat Aceh mengetahui tentang partai Aceh. Namun berbeda dengan partai politik lokal yang lain, yang harus mencari strategi-strategi khusus dalam mempromosikan partainya.</p>

	<p style="text-align: center;">Tarmizi M. Ali</p>	<p style="text-align: center;">Petani</p>	<p>“.....Saya mengetahui sedikit tentang sejarah pembentukan partai politik lokal Aceh, walaupun saya asli orang Aceh. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya belajar lagi tentang partai politik lokal Aceh tersebut. Untuk keberadaan partai politik lokal di Aceh sendiri sangat membantu masyarakat Aceh, hanya saja masih banyak yang berasumsi bahwa partai lokal Aceh tersebut hanya membantu pihak-pihak tertentu saja, dan untuk dapat bergabung ke dalam sebuah pemerintahan dan lainnya perlu dukungan/ rekomendasi dari pihak partai politik lokal Aceh langsung. Sangat jelas terlihat adanya perbedaan antara partai politik lokal Aceh dengan partai nasional khususnya di Aceh. Untuk peluang dalam pemilu 2024 mendatang seperti halnya partai politik lokal Aceh akan lebih unggul dibandingkan partai nasional. Namun untuk dapat mengambil hati rakyat dalam memperoleh suara yang tinggi pada saat pemilu, sebaiknya para anggota politik lokal mengkampanyekan dirinya dengan mendatangi desa-desa, menempel sticker, jangan mereka dekat masyarakat disaat sudah mau pemilu saja, sebelumnya mereka kemana?.</p>
--	--	--	---

DAFTAR II		Wawancara	
Nama	Pekerjaan		
Sri Rahmini	Pegawai Honorer	<p>“...Menurut saya partai politik lokal Aceh yang akan unggul kembali pada pemilu 2024 mendatang adalah Partai Aceh, dilihat dari tahun sebelumnya Partai Aceh lebih unggul.”</p>	
Mukhtar	Guru	<p>“...Strategi yang dilakukan oleh partai politik lokal dalam mempromosikan partainya adalah dengan cara kampanye yang mengumpulkan sejumlah masyarakat-masyarakat pada ruang terbuka, karena menurut saya masyarakat senang dengan adegan seperti itu, di bandingkan partai politik yang mempromosikan partainya melalui media sosial.</p>	
Aiyub	Petani	<p>“...Saya lebih suka dengan partai politik lokal yang kampanye di lapangan seperti pada pemilu sebelumnya, menurut itu sangat bisa menarik perhatian masyarakat, karena pada saat kampanye berlangsung para tamu (masyarakat) mendapat doorprize baik itu baju partai atau bingkisan lainnya.</p>	
Imran	Guru	<p>“... Untuk partai yang akan unggul di pemilu tahun 2024 menurut saya adalah Partai Nanggroe Aceh, karena banyak dari segi anggota</p>	

			<p>partainya saja sangat membantu masyarakat dan mendengar segala keluhan rakyat. Saya tidak tahu bagaimana aspirasi partai yang lain, tapi secara pribadi menurut saya PNA akan unggul pada pemilu kedepan ini.</p>
--	--	--	--



DAFTAR III			Wawancara
Nama	Pekerjaan		
Rusli Mahmud	Petani	<p>“Saya tidak mengetahui tentang partai politik lokal, saya cuma tau Partai Aceh saja, karena anggota Partai Aceh sering membantu keseharian saya, jadi pemilu tahun 2024 nanti saya pilih PA lagi.</p>	
Ilyas	Petani	<p>“.....Menurut saya partai nasional lebih tepat untuk jadi pilihan saya, dibalik pendidikannya yang berkualitas, orang yang berkompeten, dan cocok untuk jadi pilihan perwakilan rakyat. Kalau untuk bantuan menurut saya partai nasional juga sering memberikan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya partai politik lokal Aceh saja yang sering memberikan bantuan.</p>	
Ayu Fadira	Pedagang	<p>“.....Menurut saya partai politik lokal Aceh yang akan menang pada pemilu 2024 nanti adalah Partai Aceh, partainya sudah dikenal luas oleh masyarakat yang ada di seluruh Aceh. Partai Aceh banyak memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang ada di perdesaan, bahkan yang orang tuanya sudah meninggal saat konflik GAM dulu, diberikan bantuan oleh mereka. Semoga di Aceh tidak akan terjadi lagi pertumpahan darah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.</p>	
Heri Mirsal	Fresh Graduate	<p>“Kampanye antar partai saat ini sudah sangat banyak beredar poster-</p>	

			<p>poster dan baliho yang terpampang dimana-mana setiap sudut jalan. Namun setelah saya perhatikan dengan mempromosikan partai melalui spanduk, sticker itu sangat menguras kantong anggota partai, mereka memerlukan modal yang cukup besar untuk itu. Namun bagaimana jika mereka tidak menang, pasti sangat depresi dengan jumlah uang yang sangat besar telah dikeluarkan. Menurut saya mempromosikan partai atau pribadi independen anggota partai dengan cara iklan, atau menggunakan media sosial sangat efektif dan menghemat pengeluaran, dan dana yang tersebut bisa dipakai untuk kepentingan lainnya.</p>
--	--	--	---

DAFTAR IV	Nama	Pekerjaan	Wawancara
Basyah Ali	Guru Pengajian	“... Saya belum bisa menebak siapa dan anggota apa yang akan menjadi pemenang nanti pada pemilu 2024. Saya juga memihak kepada partai atau anggota partai yang menurut saya memang cocok untuk menjadi wakil rakyat nanti kedepannya.”	“... sebenarnya saya tidak terlalu paham dengan pengertian dan perbedaan antara partai politik nasional dan partai politik lokal, saya hanya mengikuti rekomendasi anak saya, apa yang dipilih anak saya jadi itu yang saya pilih nanti pas pemilu. Tapi yang akan menang pada pemilu 2024 nanti adalah partai Aceh.”
Nazaruddin	Petani	“... Menurut saya strategi partai dalam mengkampanyekan partainya guna menarik masyarakat untuk memilih partainya pada saat pemilu nanti, itu cukup dengan mengadakan pertemuan publik seperti kampanye pada umumnya. Karena jika anggota partai politik itu berkampanye melalui media sosial itu kurang efektif, karena masyarakat tidak dapat berinteraksi langsung dengan anggota partai. Kemudian saya harap kepada calon anggota partai yang terpilih pada	“... Menurut saya strategi partai dalam mengkampanyekan partainya guna menarik masyarakat untuk memilih partainya pada saat pemilu nanti, itu cukup dengan mengadakan pertemuan publik seperti kampanye pada umumnya. Karena jika anggota partai politik itu berkampanye melalui media sosial itu kurang efektif, karena masyarakat tidak dapat berinteraksi langsung dengan anggota partai. Kemudian saya harap kepada calon anggota partai yang terpilih pada
Abdullah Pakeh	PNS		

			<p>pemilu 2024 mendatang dapat menjadi perwakilan rakyat yang tidak mengecewakan rakyat-rakyatnya</p> <p>“....Menurut saya partai politik nasional akan lebih unggul. Karena partai politik nasional lebih terjamin dibandingkan dengan partai politik lokal, tidak ada pilih kasih antara satu sama lain dipihak masyarakat. Untuk semua partai yang akan menang pada pemilu nanti, saya harap dapat benar menjadi wakil rakyat dengan segala aspirasi yang diberikan nanti.</p>
<p>Marzuwan, S.Pd</p>	<p>PNS</p>		

LAMPIRAN II:

DOKUMENTASI



Wawancara dengan TGK Muhibbuddin salah satu anggota DPW partai PNA Kabupaten Pidie Jaya,



Wawancara dengan Aiyub perwakilan masyarakat pada Dapil II



Wawancara dengan Mukhtar selaku Guru SMA Negeri 1 Pidie Jaya perwakilan Dapil II



Wawancara dengan Ilyas perwakilan Dapil III



Wawancara dengan Imran salah satu Guru di Pidie Jaya dan Perwakilan Dapil II



Wawancara dengan Nazaruddin Perwakilan Dapil IV



Wawancara dengan Ghivari Dermawan perwakilan Dapil I



Wawancara dengan Tarnizi M. Ali perwakilan Dapil I



Wawancara dengan Sri Rahmini Perwakilan Dapil II





Wawancara dengan Zakaria Husein perwakilan Dapil I



Wawancara dengan Hj. Zainab M. Ali perwakilan Dapil I



Wawancara dengan Marzuwan perwakilan Dapil IV



Wawancara dengan Heri Mirsal Perwakilan Dapil III



Wawancara dengan Basyah AB selaku Guru Pengajian perwakilan Dapil IV



Wawancara dengan Ayu Fadira



Wawancara dengan Abdullah Pakeh



Wawancara dengan Rusli Mahmud

LAMPIRAN III:**Pertanyaan Wawancara****Nama****Alamat****Pekerjaan****SASARAN WAWANCARA DENGAN PERWAKILAN MASYARAKAT
DAN PERWAKILAN PARTAI POLITIK LOKAL.****• PERWAKILAN MASYARAKAT DAN AKADEMISI**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Partai Politik Lokal di Aceh ?
2. Apa pandangan Bapak/ibu terhadap keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh ?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang membedakan Partai Politik Lokal di Aceh dengan Partai Nasional (PARNAS) ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah kehadiran partai Lokal di Aceh ini mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Pidie Jaya ?
5. Menurut Bapak/Ibu adakah peluang Partai Lokal Aceh pada pemilu 2024 dapat memenangi pemilu ?
6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Partai Lokal Aceh agar lebih membantu masyarakat Pidei Jaya?
7. Apa saran atau masukan dari Bapak/Ibu terhadap partai Lokal Aceh ?

- **PERWAKILAN PARTAI LOKAL ACEH**

1. Apa pandangan bapak terhadap keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh, apakah keberadaannya dapat menjawab aspirasi masyarakat Aceh ?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap peluang Partai Lokal Aceh pada pemilihan umum 2024 ?
3. Apakah keberadaan Partai Lokal Aceh mampu mengalahkan strategi politik dari Pandangan masyarakat di Aceh ?
4. Apa program dari Partai Bapak untuk bisa meningkatkan suara dan kepercayaan dari masyarakat Pidie Jaya ?
5. Menurut anda, apa harapan partai lokal untuk keberlangsungan demokrasi di Aceh dapat terjaga dengan damai ?

